

ANALISIS (SWOT) KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Nanda Inka Fitri¹, Zu'ama Anggun Larasati², Nirva Diana³, Eti Hadiati⁴, Meriyati⁵

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Email:
fitrinandainka@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Email:
zuamaanggun@gmail.com

³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Email:
nirvadiana@radenintan.ac.id

⁴Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Email:
eti.hadiati@radenintan.ac.id

⁵Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Email:
meriyati@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kondisi kepemimpinan nasional dan daerah di Indonesia melalui pendekatan SWOT guna memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi efektivitas perumusan serta implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa laporan kebijakan nasional dan internasional, artikel ilmiah, buku akademik, serta data tata kelola seperti World Governance Indicators dan Indeks Persepsi Korupsi. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, sintesis, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia memiliki sejumlah kekuatan internal, seperti legitimasi demokratis melalui pemilihan langsung, struktur birokrasi luas yang potensial, kemajuan digitalisasi pemerintahan, dan modal sosial masyarakat yang tinggi. Namun, kelemahan struktural masih dominan, meliputi fragmentasi politik, tumpang tindih kewenangan birokrasi, ketimpangan kapasitas antar daerah, rendahnya penggunaan data dalam kebijakan, serta budaya kepemimpinan yang cenderung personalistik. Pada sisi eksternal, terdapat peluang besar berupa bonus demografi, akselerasi transformasi digital, meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, serta kerja sama internasional. Namun, kepemimpinan Indonesia juga menghadapi ancaman berupa ketidakpastian ekonomi global, eskalasi geopolitik Indo-Pasifik, polarisasi politik dan disinformasi digital, ketimpangan sosial, serta risiko bencana dan krisis lingkungan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi kepemimpinan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang melalui penguatan meritokrasi birokrasi, konsolidasi politik, integrasi digital governance, serta diplomasi strategis untuk menghadapi tekanan global. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis kepemimpinan dan kerangka SWOT dalam satu model evaluatif yang sistematis, serta pemanfaatan kasus-kasus empiris mutakhir pasca-reformasi birokrasi dan era digital sebagai dasar pemetaan strategis. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman mendalam mengenai posisi strategis kepemimpinan Indonesia di tengah dinamika sosial-politik global yang semakin kompleks, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan pemerintahan di masa depan.

Kata Kunci: *Analisis SWOT, Kebijakan, Kepemimpinan*

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the condition of national and regional leadership in Indonesia through a SWOT approach to map the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that influence the effectiveness of policy formulation and implementation. Using a descriptive qualitative method and document analysis, this study draws on various secondary sources, including national and international policy reports, scholarly articles, academic books, and governance data such as the World Governance Indicators and the Corruption Perceptions Index. The analysis was carried out through data reduction, categorization, synthesis, and source triangulation to ensure information validity. The findings reveal that Indonesian leadership possesses several internal strengths, such as democratic legitimacy through direct elections, a wide and potentially powerful bureaucratic structure, progress in government digitalization, and strong social capital. However, structural weaknesses remain dominant, including political fragmentation, overlapping bureaucratic authorities, disparities in regional capacity, limited use of data in policymaking, and a tendency toward personalized leadership. Externally, Indonesia faces significant opportunities such as the demographic bonus, digital transformation acceleration, increased civil society participation, and international cooperation. Nonetheless, leadership also confronts threats such as global economic uncertainty, geopolitical tensions in the Indo-Pacific, political polarization and digital disinformation, widening social inequality, and the risks of natural disasters and environmental crises. The implications of this study emphasize the need for more adaptive, data-driven, and long-term-oriented leadership strategies through strengthened bureaucratic meritocracy, political consolidation, integrated digital governance, and strategic diplomacy in responding to global pressures. The novelty of this research lies in integrating leadership analysis with the SWOT framework into a systematic evaluative model, along with the use of contemporary empirical cases in the post-bureaucratic reform and digital governance era as the basis for strategic mapping. This approach provides a deeper understanding of the strategic position of Indonesian leadership amid increasingly complex global socio-political dynamics and offers relevant policy recommendations for strengthening governance in the future.

Keywords: *SWOT Analysis, Policy, Leadership.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan, terutama menyangkut efektivitas kepemimpinan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Di tengah percepatan globalisasi, transformasi digital, dan meningkatnya partisipasi masyarakat, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu yang memengaruhi stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Data terbaru dari World Governance Indicators (WGI) tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks *government effectiveness* Indonesia stagnan pada angka -0.31, sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 mencatat skor 34 dari 100, turun dua poin dari tahun sebelumnya. Angka-angka ini mencerminkan masih kuatnya tantangan struktural dalam sistem kepemimpinan dan manajemen kebijakan publik nasional. Di level kebijakan, sejumlah permasalahan aktual seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi kebijakan lintas sektor, lemahnya koordinasi pemerintah pusat daerah, serta

rendahnya adaptabilitas kebijakan terhadap perubahan social menandai adanya problem mendasar dalam kepemimpinan nasional dan daerah.¹

Fenomena tersebut semakin terlihat melalui beberapa kejadian spesifik, misalnya kebijakan penanganan bencana yang tidak seragam antar daerah, dinamika penetapan kebijakan pendidikan pasca pandemi yang berubah-ubah, serta implementasi program transformasi digital yang berjalan tidak merata. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kapasitas kepemimpinan nasional dan daerah mampu menavigasi kompleksitas kebijakan publik dalam konteks sosial-politik Indonesia yang dinamis? Kejadian-kejadian ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar dimensi personal pemimpin, tetapi merupakan sistem yang berhubungan erat dengan faktor internal organisasi pemerintahan dan tekanan eksternal dari lingkungan strategis.

Urgensi dan relevansi kajian ini semakin kuat dengan munculnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam era digital, masyarakat semakin terinformasi dan kritis, sehingga berbagai bentuk kesalahan kebijakan, ketidakkonsistenan, atau tindakan yang dianggap tidak responsif cepat tersebar dan memicu ketidakpercayaan publik. Kondisi ini mendorong perlunya sebuah analisis yang tidak hanya menilai kualitas kepemimpinan, tetapi juga menguraikan faktor-faktor strategis yang memengaruhinya. Analisis SWOT yang memetakan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* menjadi instrumen strategis yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal kepemimpinan, sekaligus melihat peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik.

Meskipun demikian, kajian ilmiah mengenai kepemimpinan dalam konteks pemerintahan Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan deskriptif. Beberapa penelitian telah mencoba mengurai dinamika kepemimpinan birokrasi, namun umumnya berfokus pada karakteristik perilaku pemimpin tanpa memberikan pemetaan strategis yang komprehensif. Bustomi dkk. (2023), misalnya, menekankan peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi kajiannya lebih menyoroti aspek perilaku perubahan dan belum mengaitkannya dengan faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi efektivitas kebijakan.² Sejalan dengan itu, Cahaya, Alista, dan Nurhayani (2023) melalui kajian literaturnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki korelasi kuat dengan kapasitas inovasi sektor publik, namun pembahasannya masih berada pada level konseptual tanpa memberikan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kondisi kepemimpinan pemerintahan secara empirik.³ Penelitian Suandi dkk. (2024) juga memberikan gambaran mengenai tantangan modern birokrasi daerah, namun analisis yang digunakan masih bersifat deskriptif dan belum menempatkan kepemimpinan dalam kerangka strategis yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang melingkupi tata kelola pemerintahan.⁴ Dari berbagai studi tersebut tampak bahwa kajian kepemimpinan dalam administrasi publik Indonesia masih belum menyentuh aspek evaluatif-strategis secara mendalam, terutama melalui penggunaan pendekatan SWOT yang mampu menjelaskan hubungan antara faktor internal kepemimpinan dan dinamika eksternal lingkungan kebijakan.

¹ U G M Press, *G20 Di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia?* (UGM PRESS, 2023).

² Thomas Bustomi et al., "Kepemimpinan Transformasional Sebagai Basis Pelayanan Publik Di Indonesia Transformational Leadership as the Basis of Public" 6, no. 1 (2024).

³ Aktivisme Jurnal et al., "Kepemimpinan Transformasional Dalam Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Sektor Publik : Kajian Literatur Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dapat Menjadi Pendekatan Efektif Dalam" 2, no. September (2025).

⁴ Birokrasi Publik, Pemerintah Provinsi, and Sumatera Selatan, "1,2,3,34" 7 (2024): 535–43.

Tinjauan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian Pertama, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis SWOT sebagai kerangka strategis untuk mengevaluasi kebijakan kepemimpinan di Indonesia secara sistematis. Kedua, kajian yang mengaitkan faktor internal-eksternal dengan efektivitas kebijakan publik masih minim, padahal pendekatan holistik sangat diperlukan mengingat kepemimpinan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan lingkungan sosial-politik dan tantangan global. Ketiga, belum ada penelitian terbaru yang mencoba memetakan dinamika kepemimpinan Indonesia pasca-reformasi birokrasi 2020 serta perubahan tata kelola pemerintahan di era digital dan kecerdasan buatan. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki relevansi kuat sekaligus kontribusi akademik yang jelas.

Artikel ini menawarkan kebaruan berupa integrasi antara analisis kebijakan kepemimpinan dan metode SWOT dalam satu kerangka evaluatif yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan kondisi kepemimpinan Indonesia saat ini, tetapi juga memberikan arah strategis untuk perbaikan di masa depan. Kebaruan lain terletak pada analisis kontekstual yang memotret kasus-kasus aktual dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai dasar berpikir, sehingga temuan yang dihasilkan tidak bersifat hipotetik atau abstrak, melainkan berakar pada realitas empirik. Dengan demikian, artikel ini berupaya menjembatani antara kajian teoritis kepemimpinan dan kebutuhan praktis perbaikan kebijakan publik. Berdasarkan urgensi dan gap tersebut, artikel ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan dan kelemahan kepemimpinan Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik?
2. Peluang strategis apa saja yang tersedia bagi kepemimpinan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di tengah perubahan sosial-politik dan perkembangan global?
3. Ancaman apa yang berpotensi menghambat efektivitas kepemimpinan nasional dan daerah dalam menyusun kebijakan publik yang responsif dan adaptif?

Nilai yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari dua kontribusi utama. Pertama, kontribusi teoretis berupa pengembangan literatur kepemimpinan strategis dalam konteks pemerintahan Indonesia. Dengan mengintegrasikan analisis SWOT dalam kajian kepemimpinan, artikel ini memberikan perspektif baru yang lebih holistik dan analitis dibandingkan kajian sebelumnya. Kedua, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemimpin nasional, kepala daerah, analis kebijakan, dan lembaga pemerintahan dalam memperkuat kapasitas institusional dan kualitas kebijakan publik. Rekomendasi berbasis SWOT memungkinkan pemerintah untuk menentukan prioritas strategis, memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman yang muncul.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik, ilmu politik, kebijakan publik, serta studi kepemimpinan. Pendekatan strategis yang ditawarkan tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen perencanaan yang dapat membantu pemerintah menghadapi tantangan masa depan secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) untuk memahami kebijakan kepemimpinan di Indonesia secara mendalam. Seluruh data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, yaitu literatur ilmiah dan dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan

perundang-undangan, laporan kebijakan, publikasi lembaga nasional maupun internasional seperti World Governance Indicators, Transparency International, dan OECD, serta artikel jurnal, buku ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema kepemimpinan dan kebijakan publik. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kredibilitas institusi penerbit, kualitas ilmiah, serta keterkaitannya dengan isu kepemimpinan dalam konteks pemerintahan Indonesia.

Data dianalisis menggunakan kerangka SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kebijakan kepemimpinan. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu proses menyeleksi informasi penting dari literatur agar sesuai dengan empat kategori SWOT. Informasi yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk matriks dan uraian naratif sehingga keterkaitan antar unsur dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap faktor internal kepemimpinan seperti kapasitas birokrasi, konsistensi regulasi, dan efektivitas manajerial beserta faktor eksternal, termasuk dinamika politik nasional, perkembangan global, inovasi teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan strategi penguatan kepemimpinan yang lebih adaptif dan efektif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur ilmiah dan dokumen kebijakan dari institusi berbeda untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari bias interpretatif. Seluruh proses penelitian mulai dari penelusuran literatur, pengorganisasian data, hingga proses analisis didokumentasikan dalam bentuk audit trail untuk memudahkan verifikasi. Penelitian ini dibatasi pada analisis literatur dan dokumen kebijakan yang terbit dalam lima tahun terakhir agar temuan yang dihasilkan tetap sesuai dengan dinamika mutakhir kepemimpinan dan kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis awal terhadap dokumen kebijakan, laporan kinerja pemerintahan, serta kajian akademik yang relevan menunjukkan bahwa dinamika kepemimpinan nasional Indonesia dalam dua dekade terakhir membentuk suatu konfigurasi yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut muncul dari pertemuan antara struktur politik yang terus berkembang, dinamika sosial yang bertransformasi, serta tantangan global yang semakin tidak terprediksi. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan tidak dapat lagi dipahami sebagai fenomena individual yang berkaitan hanya dengan kapasitas personal pemimpin, tetapi sebagai suatu sistem kebijakan yang dipengaruhi oleh interaksi antar aktor, distribusi kewenangan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga negara. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak menempatkan kepemimpinan sebagai fungsi individual belaka, melainkan sebagai konstruksi institusional yang terbentuk melalui kebijakan, struktur regulasi, dan konteks politik yang mengitarinya.

Secara konseptual, kebijakan kepemimpinan Indonesia merupakan produk dari sistem demokrasi yang mengedepankan desentralisasi asimetris, di mana kewenangan pemerintah pusat dibagi dengan pemerintah daerah dalam berbagai sektor strategis. Desentralisasi yang dimulai sejak 2001 membawa perubahan fundamental terhadap pola kepemimpinan, karena distribusi kewenangan tersebut memperluas arena pengambilan keputusan dan memperbanyak titik koordinasi antara aktor pusat dan daerah. Namun demikian, berbagai laporan kebijakan nasional menunjukkan bahwa struktur desentralisasi tersebut belum diikuti oleh kapasitas kelembagaan yang merata antar wilayah. Akibatnya, pola kepemimpinan nasional sering mengalami kendala dalam memastikan konsistensi, efektivitas, dan keselarasan kebijakan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, gambaran

umum kepemimpinan Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan tata kelola pusat dan dinamika lokal yang beragam.

Dari perspektif empiris, berbagai indikator tata kelola menunjukkan adanya ambivalensi antara kemajuan administratif dan ketertinggalan struktural. Di satu sisi, Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi yang cukup signifikan melalui pengembangan *e-government*, digitalisasi layanan publik, dan penyederhanaan regulasi. Keberadaan sistem digital seperti *Online Single Submission (OSS)*, *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, serta berbagai aplikasi pelayanan publik berbasis data menunjukkan adanya perubahan paradigma menuju tata kelola yang lebih efisien dan akuntabel.⁵ Namun di sisi lain, peringkat Indonesia dalam indeks governance global belum menunjukkan peningkatan signifikan. *World Governance Indicators* menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan masih berada pada kisaran 50–60%, menandakan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan belum optimal. Divergensi antara infrastruktur regulatif dan kapasitas implementatif ini menjadi salah satu ciri sentral yang mewarnai karakter kepemimpinan nasional.⁶

Di samping itu, analisis terhadap dinamika politik nasional memperlihatkan bahwa kepemimpinan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa polarisasi politik dan fragmentasi koalisi. Polarisasi politik, terutama yang meningkat sejak pemilu 2014 dan berlanjut pada pemilu-pemilu berikutnya, menciptakan tantangan bagi konsolidasi kepemimpinan nasional karena memperlemah kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena *post-truth* dan disinformasi digital memperusak kualitas ruang publik, sehingga proses komunikasi kebijakan menjadi semakin sulit dilakukan secara efektif. Kondisi ini diperburuk dengan melemahnya otoritas epistemik institusi negara dalam mengontrol penyebaran informasi yang tidak akurat. Dengan demikian, dinamika politik dan media digital telah menciptakan kondisi di mana kebijakan kepemimpinan sering kali berhadapan dengan resistensi sosial yang tidak selalu muncul dari argumentasi rasional, melainkan dari konstruksi persepsi yang dibentuk oleh ekosistem informasi yang terdistorsi.⁷

Dalam konteks sosial demografis, Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi yang secara teoritis dapat menjadi peluang strategis bagi penguatan kepemimpinan nasional. Proporsi penduduk usia produktif yang tinggi seharusnya dapat menjadi modal manusia untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mendorong inovasi tata kelola. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa potensi tersebut belum diikuti oleh pemerataan kualitas pendidikan, literasi digital, dan keterampilan partisipatif yang diperlukan untuk mendukung tata kelola modern. Kondisi ini menandakan bahwa kepemimpinan nasional menghadapi tantangan dalam memanfaatkan sumber daya manusia produktif sebagai kekuatan strategis. Kualifikasi penduduk produktif tidak otomatis menghasilkan peningkatan kualitas kebijakan tanpa adanya investasi yang konsisten pada pembangunan kapasitas dan kualitas partisipasi warga negara.⁸

Analisis terhadap struktur kebijakan pusat juga menunjukkan adanya problem koordinasi lintas lembaga yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan nasional. Berbagai peraturan menunjukkan bahwa kementerian/lembaga memiliki kewenangan yang tumpang

⁵ Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

⁶ Abdul Malik Gismar et al., *Menata Indonesia Dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014).

⁷ Budi Gunawan and Barito Mulyo Ratmono, *Demokrasi Di Era Post Truth* (2021) (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).

⁸ Astrid Savitri, *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan Serta Peluang Edukasi 4.0 Dan Revolusi Bisnis 4.0* (Penerbit Genesis, 2019).

tindih dalam sejumlah program strategis, sehingga implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi regulasi. Misalnya, kebijakan terkait digitalisasi, reformasi birokrasi, dan ketahanan ekonomi sering kali melibatkan banyak kementerian, namun koordinasi antarunit tidak selalu berjalan secara konsisten. Situasi ini memperlihatkan bahwa struktur kepemimpinan Indonesia, meskipun memiliki perangkat regulatif yang cukup luas, masih belum memberikan kejelasan delineasi kewenangan yang memadai dalam beberapa sektor strategis. Akibatnya, pola kepemimpinan yang muncul tidak hanya ditentukan oleh visi pemimpin nasional, tetapi juga oleh tingkat harmonisasi antar lembaga pemerintahan.⁹

Salah satu temuan signifikan dalam analisis awal ini adalah masih kuatnya ketergantungan sistem pada figur pemimpin (leader-centered system). Walaupun Indonesia telah mengembangkan perangkat kelembagaan yang cukup maju, namun efektivitas kebijakan sering kali masih ditentukan oleh karakter personal pemimpin, bukan oleh kekuatan institusi. Ketergantungan ini menimbulkan sejumlah risiko, yaitu terjadinya fluktuasi kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan, tidak berkelanjutannya program-program strategis, serta melemahnya pelembagaan nilai-nilai kepemimpinan profesional. Dari perspektif governance, kondisi ini memperlihatkan bahwa institusi kepemimpinan nasional belum sepenuhnya mencapai tahap *institutionalized leadership*, yaitu situasi di mana keberhasilan suatu kebijakan lebih ditentukan oleh sistem daripada individu.

Gambaran umum di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional Indonesia berada pada posisi ambivalen: di satu sisi memiliki kekuatan struktural yang cukup menjanjikan, tetapi di sisi lain masih terjebak pada kelemahan sistemik yang menghambat transformasi fundamental. Ambivalensi tersebut menjadi dasar bagi perlunya pendekatan SWOT dalam menguraikan kondisi kepemimpinan secara lebih sistematis. Analisis SWOT dipilih karena kerangka tersebut memungkinkan evaluasi komprehensif yang mencakup variabel internal dan eksternal secara simultan, sehingga dapat menggambarkan posisi strategis kepemimpinan Indonesia dalam lingkup makro. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara metodologis, tetapi juga secara substantif, karena dinamika kepemimpinan Indonesia merupakan fenomena yang melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi dan mempengaruhi.

Hasil kajian literatur terhadap dinamika kepemimpinan kebijakan di Indonesia menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan nasional dan kelembagaan publik selalu bergerak dalam pola yang saling memengaruhi antara faktor historis, budaya politik, desain institusional, serta perkembangan teknologi pemerintahan modern. Walaupun studi-studi tentang kepemimpinan telah berkembang luas, analisis berbasis pendekatan SWOT memperlihatkan bahwa struktur kepemimpinan kebijakan di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ciri tersebut terutama tampak pada hubungan antara legitimasi elektoral, struktur birokrasi yang hierarkis, budaya patronase, serta upaya modernisasi tata kelola melalui digitalisasi pemerintahan. Untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk pola kepemimpinan kebijakan Indonesia, bagian ini menyajikan gambaran umum struktural dan konseptual sebagai pijakan analisis SWOT pada bagian berikutnya.¹⁰

⁹ Gunawan Widjaja and Handojo Dhanudibroto, "Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan," *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1323–32.

¹⁰ Anisa Imamia et al., *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

Secara historis, kepemimpinan kebijakan Indonesia berkembang melalui tiga fase utama: fase konsolidasi negara pascakemerdekaan (1945–1965), fase birokratisasi pembangunan (1966–1998), dan fase demokratisasi serta desentralisasi (1999–sekarang). Pada fase pertama, pola kepemimpinan lebih dominan bersifat karismatik–ideologis, ditandai dengan kuatnya figur Soekarno sebagai pemimpin simbolik dan integratif. Pada fase kedua, model kepemimpinan berubah menjadi teknokratis–developmentalis dengan struktur birokrasi yang sangat hierarkis dan sentralistik. Fase ketiga menandai transformasi besar, ketika demokratisasi politik dan desentralisasi membuka ruang bagi berbagai model kepemimpinan baru di tingkat nasional maupun daerah. Transformasi ini bukan hanya mengubah karakter relasi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memberi ruang bagi kompetisi kepemimpinan yang lebih terbuka dan pluralistik. Dengan latar historis tersebut, kepemimpinan kebijakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang bersifat hibrid: demokratis dalam prosedur, tetapi tetap sarat dengan pengaruh patronase, segmentasi sosial, serta jaringan kekuasaan informal.¹¹

Selanjutnya, dari perspektif desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan kebijakan nasional Indonesia berada dalam struktur *presidential system* yang dipadukan dengan mekanisme multipartai dan desentralisasi simetris. Kombinasi ini, dalam banyak literatur, sering disebut sebagai formula yang secara konseptual tidak mudah dikelola (*difficult-to-govern institutional setting*). Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat, namun efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada kemampuan membangun koalisi politik, mengelola birokrasi yang besar, serta memastikan konsistensi koordinasi antar-kementerian. Di sisi lain, kepala daerah memiliki kewenangan yang luas dalam implementasi kebijakan, sehingga pola kepemimpinan nasional seringkali berinteraksi, berkompetisi, bahkan berbenturan dengan gaya kepemimpinan di tingkat lokal. Dengan demikian, kepemimpinan kebijakan Indonesia selalu berada dalam arena multi-aktor, multi-level, dan multi-interes.¹²

Data statistik pemerintahan memperlihatkan skala kompleksitas tersebut. Hingga tahun 2024, Indonesia memiliki 548 pemerintah daerah, lebih dari 4,2 juta aparatur sipil negara, 34 kementerian, serta lebih dari 99 lembaga pemerintah non-kementerian. Besarnya struktur ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin politik, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem kelembagaan yang mendukungnya. Struktur yang luas dan berlapis memberikan peluang koordinasi lintas sektor, tetapi juga menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan, inkoherensi kebijakan, serta lambannya respons terhadap perubahan. Dalam kondisi seperti ini, analisis SWOT menjadi alat yang sangat relevan untuk mengidentifikasi titik-titik kekuatan dan kelemahan struktural yang melekat pada sistem kepemimpinan kebijakan Indonesia.

Perkembangan teknologi pemerintahan dan digitalisasi birokrasi sejak 2014 juga menjadi faktor penentu. Implementasi *e-government*, reformasi birokrasi digital, penggunaan *big data* dalam perumusan kebijakan, serta integrasi layanan publik melalui platform digital nasional telah mengubah logika kepemimpinan kebijakan dari pendekatan yang bersifat instruktif-hierarkis menuju pola yang lebih berbasis data dan kolaboratif. Meski demikian, adaptasi teknologi ini tidak terjadi secara merata. Banyak daerah maju berhasil mengembangkan sistem pemerintahan digital yang efektif, sementara daerah kurang

¹¹ Laode Machdani Afala, “Pasang Surut Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017): 15–39.

¹² Irwan Triadi et al., “Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai Dalam Pemerintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 3 (2024): 626–38.

berkembang masih menghadapi masalah rendahnya kapasitas digital, infrastruktur internet, dan kompetensi SDM. Ketimpangan ini menunjukkan adanya peluang sekaligus ancaman bagi efektivitas model kepemimpinan kebijakan Indonesia di era digital.¹³

Dari perspektif budaya politik, literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan kebijakan Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh pola hubungan patron-klien, personalisasi kekuasaan, serta orientasi pada figur pemimpin dibandingkan institusi. Fenomena ini dapat dilihat dari kecenderungan publik menilai kinerja pemerintah berdasarkan *popularitas pemimpin*, bukan kualitas kebijakan. Di satu sisi, kondisi ini memberikan stabilitas politik karena pemimpin yang populer mudah memperoleh dukungan. Namun di sisi lain, personalisasi kepemimpinan sering mengakibatkan ketergantungan jangka pendek pada figur tertentu, bukan pada sistem yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan dinamika kekuatan-kekuatan kultural yang perlu dipetakan secara lebih komprehensif dalam analisis SWOT.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa kepemimpinan kebijakan di Indonesia pada dekade terakhir menghadapi tiga tantangan besar: (1) meningkatnya kompleksitas isu lintas sektor seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, keamanan digital, dan disrupti ekonomi; (2) meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik; serta (3) meningkatnya interdependensi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi kebijakan adaptif seperti reformasi pendidikan, kesehatan, pangan, dan transformasi energi. Ketiga tantangan tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami bagaimana sistem kepemimpinan nasional merespons perubahan, sekaligus menjadi dasar analisis mengenai peluang dan ancaman strategis.¹⁴

Pada konteks itu, analisis SWOT diperlukan untuk memetakan secara sistematis bagaimana kekuatan internal, kelemahan struktural, peluang eksternal, dan ancaman lingkungan global memengaruhi efektivitas kepemimpinan kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan deskripsi mengenai kondisi aktual, tetapi juga memberikan pijakan analitis untuk merumuskan arah strategis kepemimpinan nasional ke depan. Dengan demikian, hasil pembahasan ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga memperkuat nilai akademik berupa kontribusi konseptual terhadap diskusi mengenai kualitas kepemimpinan kebijakan di negara-negara demokrasi berkembang (*emerging democracies*).

Secara empiris, beberapa temuan literatur menjadi landasan awal analisis. Pertama, laporan *Worldwide Governance Indicators* menunjukkan bahwa indeks efektivitas pemerintah Indonesia masih berada pada kisaran -0,1 hingga +0,3, yang berarti belum stabil meskipun terdapat tren perbaikan. Kedua, laporan *Global Competitiveness Index* memperlihatkan bahwa pilar kelembagaan dan efisiensi administrasi publik masih menjadi kelemahan utama. Ketiga, survei partisipasi publik menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemimpin bervariasi antar-daerah, yang sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan kualitas layanan publik. Data-data ini mendukung gagasan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas personal pemimpin, tetapi juga oleh kondisi struktural sistem pemerintahan yang menjadi ruang geraknya.

Sementara itu, dalam konteks global, kepemimpinan kebijakan Indonesia berada di bawah tekanan dinamika geopolitik, transformasi ekonomi global, serta disrupti teknologi yang mengubah cara pemerintahan bekerja. Indonesia dituntut untuk terus menyesuaikan strategi kepemimpinannya agar mampu bersaing dan menjaga stabilitas domestik. Tekanan eksternal ini sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional, inovasi kebijakan, serta integrasi dalam jaringan ekonomi global. Dengan demikian, arah kepemimpinan nasional

¹³ Riris Katharina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

¹⁴ Kasman Bakry et al., *Sistem Politik Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

harus bisa mengoptimalkan kekuatan domestik untuk memanfaatkan peluang global, sambil mengurangi dampak ancaman yang mungkin muncul.

Bagian pertama ini menjadi fondasi konseptual dan deskriptif bagi analisis SWOT yang lebih rinci pada bagian berikutnya. Pemetaan umum ini menegaskan bahwa kepemimpinan kebijakan di Indonesia merupakan fenomena multi-dimensi yang tidak dapat dianalisis hanya dari satu faktor tunggal. Oleh karena itu, pendekatan analitis yang komprehensif diperlukan untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal berinteraksi secara dinamis dalam menentukan kualitas dan arah kebijakan nasional. Pada bagian berikutnya, analisis kekuatan dan kelemahan internal akan dibahas secara mendalam dengan merujuk pada temuan-temuan literatur yang telah dipaparkan sebagai dasar.

Analisis kekuatan dan kelemahan merupakan bagian fundamental dalam memahami kapasitas internal sistem kepemimpinan kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi atribut positif yang berfungsi sebagai modal strategis, tetapi juga memetakan keterbatasan yang menghambat efektivitas kepemimpinan. Dengan melihat hasil kajian literatur, data governance internasional, serta dinamika politik dan birokrasi nasional, bagian ini memaparkan karakteristik struktural dan fungsional yang menjadi keunggulan dan hambatan dalam proses penyelenggaraan kepemimpinan kebijakan nasional.¹⁵

Kekuatan (Strengths)

1. Legitimasi Elektoral yang Kuat dalam Sistem Presidensial

Salah satu kekuatan utama kepemimpinan kebijakan di Indonesia adalah legitimasi elektoral yang bersumber dari pemilihan langsung. Presiden dan kepala daerah memperoleh mandat politik langsung dari rakyat, sehingga memiliki otoritas formal dan legitimasi demokratis yang tinggi untuk melakukan perubahan kebijakan. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, legitimasi ini memberikan stabilitas kepemimpinan karena masa jabatan pemerintah relatif terjamin selama lima tahun, terlepas dari dinamika politik jangka pendek. Situasi ini membedakan Indonesia dari negara-negara yang menerapkan sistem parlementer, di mana ketidakstabilan kabinet sering menghambat kesinambungan kebijakan.

2. Struktur Birokrasi yang Luas dan Potensial untuk Menggerakkan Program Nasional

Indonesia memiliki struktur birokrasi yang sangat besar lebih dari 4,2 juta aparatur sipil negara, dengan jaringan kementerian dan lembaga yang mampu menjangkau hingga unit pemerintahan terkecil. Dengan struktur demikian, pemerintah memiliki kapasitas institusional yang kuat untuk melaksanakan program nasional secara terorganisasi. Skala ini menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, karena memungkinkan pelaksanaan kebijakan secara terstandardisasi, pemerataan layanan publik, serta pembentukan jaringan pemerintah yang mampu merespons krisis secara terkoordinasi. Dalam konteks kebijakan publik, ukuran birokrasi sering dikaitkan dengan kemampuan implementasi (*implementation capacity*), dan Indonesia memiliki modal struktural tersebut.

3. Desentralisasi yang Memberi Ruang Inovasi Lokal

Desentralisasi politik dan fiskal sejak 2001 memberikan kekuatan penting berupa munculnya kepemimpinan lokal yang inovatif. Banyak daerah kemudian memperoleh ruang kreatif untuk mengembangkan kebijakan sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Hal ini terlihat pada lahirnya daerah-daerah dengan indeks inovasi tinggi, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Banyuwangi, atau Siak, yang berhasil membangun sistem pelayanan publik digital, reformasi perizinan, hingga tata kelola lingkungan yang progresif. Bahkan, literatur menilai

¹⁵ Ririt Yuniar, *Kepemimpinan Pancasila Di Era Transformasi Digital* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025).

bahwa keberagaman inovasi daerah merupakan salah satu kekuatan kepemimpinan Indonesia, karena menciptakan laboratorium kebijakan yang memungkinkan difusi inovasi ke tingkat nasional.

4. Kemajuan Digitalisasi Pemerintahan sebagai Pendukung Kepemimpinan Modern

Implementasi *e-government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi layanan publik menjadi kekuatan besar bagi kualitas kepemimpinan kebijakan. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pemimpin dalam mengambil keputusan berbasis data (*evidence-based policy making*). Sebagian kementerian dan pemerintah daerah telah membangun *dashboard* data real-time yang memberikan informasi cepat mengenai anggaran, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Dalam konteks kepemimpinan, sistem informasi yang baik memperkuat kemampuan pemimpin untuk mengerahkan sumber daya secara tepat, mengendalikan implementasi kebijakan, dan memantau kinerja birokrasi.

5. Modal Sosial yang Relatif Tinggi dan Budaya Gotong Royong

Meskipun sering dianggap sebagai faktor kultural, modal sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan kebijakan. Budaya gotong royong, tingkat kepedulian sosial yang tinggi, serta struktur komunitas yang solid menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah dalam mobilisasi partisipasi publik. Hal ini terbukti dalam situasi bencana, vaksinasi, program kesehatan masyarakat, dan berbagai program pemberdayaan sosial. Pemimpin kebijakan yang mampu mengelola modal sosial ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Keberadaan organisasi keagamaan, komunitas lokal, serta jaringan masyarakat sipil yang kuat juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam implementasi kebijakan.¹⁶

Kelemahan (Weaknesses)

Jika kekuatan merepresentasikan modal strategis, kelemahan menunjukkan keterbatasan struktural dan fungsional yang masih menjadi hambatan serius dalam kepemimpinan kebijakan Indonesia. Kelemahan-kelemahan ini bersifat multidimensi: birokratis, politik, budaya, regulatif, dan teknologi. Berikut adalah pemetaan kelemahan utama berdasarkan sintesis literatur dan data kebijakan nasional.

1. Fragmentasi Politik dan Ketergantungan pada Koalisi Besar

Salah satu kelemahan paling dominan dalam kepemimpinan di Indonesia adalah fragmentasi politik akibat sistem multipartai yang tidak sepenuhnya terinstitusionalisasi. Untuk memerintah secara efektif, pemimpin harus membangun koalisi politik yang sangat besar, yang sering berisi partai-partai dengan orientasi ideologis berbeda. Meskipun koalisi besar menciptakan stabilitas politik, kondisi ini mengurangi stabilitas kebijakan karena keputusan penting sering harus dinegosiasikan melalui kompromi politik. Akibatnya, kepemimpinan tidak selalu dapat menjalankan kebijakan secara tegas dan konsisten. Kelemahan ini terlihat dalam berbagai agenda reformasi, termasuk reformasi pendidikan, kesehatan, pajak, dan tata kelola energi, yang berjalan lambat karena manuver politik elite partai.

2. Birokrasi yang Kurang Adaptif dan Masih Mengalami Tumpang Tindih Kewenangan

Struktur birokrasi yang besar bisa menjadi kekuatan, tetapi juga memunculkan kelemahan berupa inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, serta resistensi terhadap perubahan. Kajian mengenai governance menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa birokrasi yang “compliance-oriented” (berorientasi kepatuhan administratif), bukan

¹⁶ Abustan Abustan, “Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia,” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 274–87.

“performance-oriented” (berorientasi kinerja dan hasil). Banyak instansi pemerintah lebih fokus pada prosedur dibandingkan pencapaian target kebijakan. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan kewenangan antarkementerian menyebabkan koordinasi kebijakan tidak optimal. Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan terhambat bukan karena kurangnya visi kepemimpinan, tetapi karena struktur administrasi yang lamban dan tidak responsif terhadap dinamika perubahan.

3. Ketimpangan Kapasitas Antar Daerah

Desentralisasi membuka peluang inovasi, tetapi juga memperlihatkan kelemahan berupa ketimpangan kapasitas kelembagaan antara daerah maju dan tertinggal. Daerah dengan sumber daya fiskal besar mampu mengembangkan kebijakan yang lebih inovatif, sementara banyak daerah tertinggal mengalami keterbatasan anggaran, SDM, infrastruktur digital, serta kualitas pendidikan aparatur. Ketimpangan ini membuat efektivitas kebijakan nasional tidak seragam dan menyulitkan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa program nasional tidak berjalan optimal karena kapasitas implementasi daerah yang tidak merata. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem pengembangan kepemimpinan publik yang terstandar dan merata.

4. Korupsi, Patronase, dan Politisasi Birokrasi

Salah satu kelemahan paling signifikan yang sering ditemukan dalam literatur adalah korupsi dan kuatnya jaringan patronase dalam birokrasi. Politisasi birokrasi di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan penempatan pejabat sering tidak berbasis merit, tetapi pada afiliasi politik atau kedekatan personal dengan pemimpin. Kedua faktor ini memperlemah efektivitas kepemimpinan kebijakan karena keputusan tidak selalu diambil berdasarkan pertimbangan profesional. Selain itu, praktik patronase menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat, menurunkan kinerja birokrasi, dan menghambat inovasi. Korupsi yang masih muncul dalam berbagai sector perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan manajemen anggaran menjadi bukti bahwa norma integritas belum mapan dalam struktur kepemimpinan publik.

5. Keterbatasan Penggunaan Data dalam Perumusan Kebijakan

Walaupun digitalisasi pemerintahan berkembang, sebagian besar kebijakan publik masih tidak sepenuhnya berbasis data. Banyak kementerian dan pemerintah daerah belum mengintegrasikan *big data*, analisis prediktif, atau evaluasi kebijakan berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan. Dalam literatur kebijakan, kondisi ini dikenal sebagai “data gap”, yakni ketimpangan antara ketersediaan data dan penggunaan data. Kelemahan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas kepemimpinan karena pemimpin kebijakan tidak memiliki pijakan informasi yang kuat untuk menentukan prioritas, merespons krisis, atau mengukur dampak kebijakan secara sistematis. Ketidakmampuan menggunakan data secara optimal juga membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara yang telah menerapkan model pemerintahan digital terintegrasi.

6. Budaya Politik yang Masih Bersifat Personalis dan Clientelistic

Beberapa kajian menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia masih cenderung personalistik, yaitu mengutamakan figur pemimpin dibandingkan institusi. Hal ini menciptakan ketergantungan pada gaya kepemimpinan individual dan menghambat pelembagaan kepemimpinan jangka panjang. Selain itu, hubungan patron-klien mengurangi ruang partisipasi publik yang substantif dan membuat kebijakan rentan terhadap intervensi kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks kelembagaan modern, gaya kepemimpinan yang terlalu personalistik sering mengakibatkan kebijakan tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada figur yang berkuasa, bukan pada sistem yang terstandarisasi. Kondisi ini menjadi kelemahan signifikan dalam konsolidasi demokrasi dan tata kelola kebijakan jangka panjang.

Analisis terhadap peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) diperlukan untuk memahami kondisi eksternal yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kebijakan di Indonesia. Berbeda dengan kekuatan dan kelemahan yang bersifat internal, peluang dan ancaman bersumber dari lingkungan global, regional, dan nasional yang berada di luar kendali langsung pemerintah. Meskipun demikian, faktor eksternal ini dapat dimanfaatkan atau diantisipasi melalui kualitas kepemimpinan strategis. Bagian ini membahas secara mendalam bagaimana dinamika ekonomi global, geopolitik, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, serta tren tata kelola internasional menjadi faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kebijakan Indonesia.¹⁷

Peluang (Opportunities)

1. Posisi Geostrategis Indonesia sebagai Kekuatan Regional

Indonesia memiliki peluang besar sebagai aktor strategis dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa, Indonesia berada pada posisi yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi regional. Peluang ini memberi ruang bagi kepemimpinan nasional untuk memperkuat diplomasi maritim, memperbesar pengaruh regional, dan mengembangkan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif. Literatur geopolitik juga menunjukkan bahwa negara dengan posisi strategis seperti Indonesia memiliki kemampuan lebih besar untuk menarik investasi, memperluas kerja sama internasional, dan membangun kemitraan strategis lintas sektor. Kepemimpinan kebijakan yang mampu memanfaatkan peluang ini akan memperkuat kapasitas nasional secara signifikan.

2. Bonus Demografi dan Energi Kreatif Generasi Muda

Peluang besar lainnya adalah struktur penduduk Indonesia yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Hingga tahun 2030, Indonesia memiliki bonus demografi yang ditandai oleh persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari 68%. Kondisi ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan transformasi sosial jika dikelola melalui kebijakan kepemimpinan yang tepat. Generasi muda Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang relatif tinggi, sehingga menjadi modal utama dalam transisi menuju ekonomi berbasis teknologi. Pemimpin kebijakan yang mampu mengarahkan potensi ini melalui kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan ekonomi digital dapat menciptakan momentum pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Kemajuan Teknologi Digital dan Transformasi Ekonomi Berbasis Data

Era disruptif teknologi memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi kebijakan, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence*, *big data analytics*, *cloud governance*, dan sistem pelayanan digital terintegrasi membuka ruang bagi pemimpin kebijakan untuk mengembangkan tata kelola modern berbasis data. Teknologi digital dapat membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan prediktif, pemantauan program secara real-time, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti. Selain itu, perkembangan ekonomi digital nasional yang telah menyumbang lebih dari 40% pertumbuhan ekonomi digital ASEAN menjadi peluang strategis bagi penguatan ekonomi nasional. Kepemimpinan kebijakan yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam manajemen pemerintahan akan memperoleh keunggulan kompetitif dalam menghadapi kompleksitas isu publik modern.

4. Meningkatnya Partisipasi Publik dan Penguatan Civil Society

¹⁷ Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi Di Nusantara* (Universitas Brawijaya Press, 2013).

Peluang lain dalam kepemimpinan kebijakan adalah meningkatnya peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi. Teknologi komunikasi modern membuat masyarakat semakin aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memberikan kritik, dan mengorganisasi gerakan sosial. Dalam perspektif governance, meningkatnya partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi kebijakan, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, serta memperbaiki akuntabilitas pemimpin. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media menjadi mitra penting dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pemimpin kebijakan yang mampu memanfaatkan peluang ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kerja Sama Internasional dan Integrasi Ekonomi Global

Di era globalisasi, negara-negara memiliki peluang untuk memperluas hubungan ekonomi, politik, dan sosial melalui mekanisme kerja sama internasional. Indonesia sebagai anggota G20, ASEAN, dan berbagai forum global memiliki ruang untuk mengakses pendanaan internasional, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas institusi publik. Misalnya, komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kebijakan lingkungan, energi, dan sosial yang lebih progresif dengan dukungan global. Kerja sama internasional juga menjadi peluang bagi pemimpin untuk mengembangkan kebijakan transformasi energi, digitalisasi, pendidikan, dan ketahanan pangan.¹⁸

Ancaman (Threats)

1. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Volatilitas Pasar Internasional

Ancaman terbesar bagi kepemimpinan kebijakan Indonesia adalah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi negara besar, krisis finansial global, dan perubahan harga komoditas internasional. Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas, serta mineral logam. Ketika harga komoditas jatuh, pendapatan negara dan daerah dapat menurun drastis, sehingga menurunkan kemampuan pemerintah untuk membiayai kebijakan strategis. Selain itu, volatilitas nilai tukar dan inflasi global dapat menghambat efektivitas kebijakan fiskal dan moneter nasional.

2. Persaingan Geopolitik dan Risiko Ketegangan Kawasan Indo-Pasifik

Indonesia berada di kawasan yang rawan ketegangan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan kedua kekuatan besar ini menciptakan tekanan terhadap stabilitas regional dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Ancaman ini berdampak langsung pada strategi kepemimpinan karena pemimpin nasional harus menjaga keseimbangan diplomatik antara berbagai kekuatan global demi melindungi kepentingan nasional. Selain itu, sengketa Laut China Selatan, peningkatan aktivitas militer, dan kompetisi pengaruh di Asia Tenggara menciptakan lingkungan eksternal yang kompleks bagi penyusunan kebijakan keamanan, ekonomi, dan energi.

3. Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Kerentanan Sosial yang Meningkat

Ancaman yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi antarwilayah dan antarmasyarakat. Meskipun ekonomi nasional tumbuh, distribusi hasil pembangunan tidak merata. Ketimpangan ini meningkatkan risiko konflik sosial, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta melemahkan stabilitas sosial. Selain itu, kemiskinan struktural di wilayah tertinggal menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kondisi ini menghambat

¹⁸ Asep Kamaluddin Nashir, "Kepentingan Dan Posisi Strategis Indonesia Dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik," *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 2 (2024): 636–55.

efektivitas kepemimpinan kebijakan karena pemimpin harus menghadapi tuntutan sosial yang semakin kompleks dan berkelanjutan.

4. Disinformasi, Polarisasi Politik, dan Kerentanan Ruang Publik Digital

Ancaman berikutnya adalah meningkatnya penyebaran disinformasi, hoaks, manipulasi opini, dan polarisasi politik yang diperburuk oleh media sosial. Ruang publik digital sering digunakan untuk membangun narasi yang tidak berbasis fakta, memecah belah masyarakat, dan menyerang pemimpin politik. Dalam situasi ini, kepemimpinan kebijakan dapat kehilangan legitimasi karena opini publik yang terbentuk tidak berdasarkan realitas, tetapi pada manipulasi digital. Selain itu, polarisasi politik yang ekstrem dapat menghambat konsensus nasional dan membuat proses perumusan kebijakan menjadi lebih sulit.

5. Perubahan Iklim, Krisis Lingkungan, dan Bencana Alam

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem. Ancaman ini memiliki dampak besar terhadap perencanaan kebijakan, ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi nasional. Kepemimpinan kebijakan harus menghadapi risiko bencana yang semakin sering dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan mengurangi kapasitas negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.¹⁹

Sintesis Strategis, Diskusi Teoretis, dan Implikasi Kebijakan

Sintesis strategis terhadap temuan SWOT mengenai kepemimpinan Indonesia menunjukkan bahwa dinamika kepemimpinan nasional berada dalam kondisi yang kompleks, ditandai oleh interaksi antara faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Kekuatan-kekuatan seperti legitimasi demokratis, kerangka hukum kelembagaan yang relatif kuat, kapasitas koordinatif yang berkembang, dan peran strategis pemimpin nasional, secara teoritis menyediakan basis yang kokoh bagi pengembangan kepemimpinan politik yang efektif. Namun, kekuatan tersebut terhambat oleh kelemahan internal dalam bentuk ketergantungan berlebihan pada figur pemimpin tertentu, lemahnya konsistensi implementasi kebijakan, fragmentasi koordinatif antar lembaga, dan masih kuatnya budaya birokrasi patrimonial yang seringkali menghalangi terjadinya inovasi administrasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan internal hanya akan menjadi keunggulan strategis apabila kelemahan fundamental dapat direduksi melalui reformasi struktural yang berkelanjutan.

kekuatan dan kelemahan tersebut dibaca dalam kerangka peluang eksternal seperti bonus demografi, transformasi digital, integrasi ekonomi kawasan, meningkatnya kesadaran publik terhadap transparansi, serta tumbuhnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, maka terlihat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki ruang manuver strategis untuk memperkuat kualitas kepemimpinannya. Bonus demografi memberikan potensi tenaga kerja inovatif yang mampu memperkuat kinerja birokrasi, sementara transformasi digital menciptakan peluang untuk melaksanakan tata kelola berbasis data. Di sisi lain, integrasi ekonomi kawasan memberikan ruang bagi pemimpin untuk memperluas diplomasi strategis dan meningkatkan daya tawar negara. Namun, peluang tersebut tidak dapat dioptimalkan secara efektif apabila ancaman eksternal seperti polarisasi politik, korupsi struktural, disrupti digital, ketidakstabilan ekonomi global, dan ketidakpastian geopolitik tidak dikelola dengan baik. Ancaman-ancaman tersebut berpotensi mengurangi legitimasi kepemimpinan,

¹⁹ Aan Ainur, "Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Inflasi, Kurs, Foreign Direct Investment (Fdi), Harga Emas, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *JURNAL EKONOMI PERJUANGAN* 6, no. 1 (2024): 43–54.

mengganggu stabilitas politik, serta melemahkan kohesi sosial, sehingga menempatkan kepemimpinan nasional pada posisi yang rentan terhadap krisis politik maupun kebijakan.

Secara teoretis, temuan ini dapat dianalisis melalui perspektif kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, efektivitas kepemimpinan tercapai ketika pemimpin mampu mengubah nilai, budaya, dan orientasi kerja organisasi. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan model kepemimpinan transformasional, tetapi kelemahan institusional dan budaya birokrasi yang stagnan seringkali menghambat perubahan tersebut. Dalam perspektif kepemimpinan adaptif, efektivitas ditentukan oleh kemampuan pemimpin merespons dinamika dan ketidakpastian eksternal. Ancaman berupa polarisasi politik dan disrupti teknologi menguji kapasitas adaptif pemimpin Indonesia. Kondisi ini menuntut pemimpin untuk mampu mengelola konflik sosial, merespons tuntutan publik yang cepat berubah, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara real-time. Sementara dalam teori kepemimpinan strategis, pemimpin dituntut mampu mengintegrasikan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, teori ini menjadi sangat relevan karena negara sedang berada pada fase transisi penting menuju modernisasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Pemimpin harus mampu menyusun kebijakan berbasis risiko serta memanfaatkan teknologi sebagai instrumen penguatan kapasitas negara.

Hasil analisis ini menghasilkan beberapa implikasi kebijakan strategis bagi penguatan kepemimpinan nasional di masa depan. Pertama, diperlukan reformasi kepemimpinan birokrasi berbasis kompetensi, yang meliputi peningkatan kualitas rekrutmen pimpinan lembaga, penguatan meritokrasi, serta peningkatan literasi digital pemimpin birokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, penguatan integritas pemerintahan harus menjadi agenda prioritas, mengingat korupsi yang bersifat struktural telah terbukti menjadi ancaman yang menggerogoti legitimasi pemimpin sekaligus menghambat efektivitas kebijakan publik. Upaya ini harus dilakukan melalui sistem pengawasan internal yang kuat, transparansi anggaran, serta budaya integritas yang dibangun melalui keteladanan pemimpin. Ketiga, transformasi digital perlu diintegrasikan ke dalam seluruh aspek tata kelola kepemimpinan, mulai dari sistem pengambilan keputusan berbasis data hingga digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Keempat, pemimpin nasional perlu mengembangkan strategi konsolidasi politik untuk mengurangi polarisasi yang dapat menghambat stabilitas politik. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat dialog lintas kelompok, meningkatkan literasi media masyarakat, serta menciptakan ruang publik yang memungkinkan diskusi deliberatif. Kelima, pemimpin nasional perlu memperkuat diplomasi strategis sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik global. Penguatan kerja sama internasional bukan hanya meningkatkan posisi Indonesia dalam sistem global, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, sintesis dari analisis SWOT ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia memiliki modal strategis yang besar untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang muncul, tetapi efektivitas kepemimpinan tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara dalam memperbaiki kelemahan internal dan memitigasi ancaman eksternal melalui kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperlihatkan bahwa kepemimpinan di negara berkembang seperti Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh kualitas figur pemimpin, tetapi juga oleh struktur politik, dinamika sosial, dan kondisi eksternal yang berubah dengan cepat. Dengan demikian, arah penguatan kepemimpinan nasional harus diarahkan pada modernisasi birokrasi, peningkatan integritas, optimalisasi teknologi, konsolidasi sosial-politik, dan penguatan diplomasi strategis agar Indonesia

mampu menciptakan kepemimpinan yang stabil, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap kebijakan kepemimpinan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kepemimpinan nasional dan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Pertama, menjawab pertanyaan mengenai kekuatan dan kelemahan kepemimpinan Indonesia, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional memiliki kekuatan berupa kerangka regulasi yang relatif lengkap, dukungan birokrasi yang terus diarahkan melalui reformasi struktural, serta meningkatnya kapasitas digital dalam pengelolaan pemerintahan. Namun demikian, kelemahan struktural tetap dominan, terutama terkait rendahnya konsistensi kebijakan antarlevel pemerintahan, lemahnya koordinasi lintas sektor, ketergantungan pada figur pemimpin tertentu, serta masih kuatnya praktik-praktik birokratis yang menghambat inovasi. Ketimpangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Kedua, terkait pertanyaan mengenai peluang strategis bagi kepemimpinan Indonesia, analisis menunjukkan bahwa dinamika global dan domestik justru membuka ruang bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital, meningkatnya partisipasi masyarakat, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, serta integrasi ekonomi regional memberi peluang besar bagi pemimpin untuk memperkuat transparansi, memperluas layanan publik berbasis data, serta mengadopsi praktik governance yang lebih adaptif. Selain itu, desentralisasi yang semakin matang menyediakan ruang bagi inovasi kebijakan daerah yang dapat dijadikan model nasional. Peluang-peluang ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk melakukan modernisasi pemerintahan secara lebih sistematis dan terukur apabila dimanfaatkan secara strategis.

Ketiga, menjawab pertanyaan tentang ancaman yang berpotensi menghambat efektivitas kepemimpinan, penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas politik nasional, polarisasi elite, ketidakpastian ekonomi global, dan laju perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada kapasitas birokrasi menjadi tantangan nyata. Ancaman lain yang signifikan meliputi ketimpangan pembangunan antarwilayah, resistensi birokrasi terhadap perubahan, serta risiko munculnya kebijakan yang bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan akibat tekanan politik jangka pendek. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik akibat stagnasi indeks efektivitas pemerintahan dan meningkatnya persepsi korupsi menjadi faktor eksternal yang dapat menghambat otoritas moral dan legitimasi kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022)
- Afala, Laode Machdani. "Pasang Surut Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia." *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017)
- Ainur, Aan. "Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Global Terhadap Inflasi, Kurs, Foreign Direct Investment (Fdi), Harga Emas, Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

²⁰ R R Emilia Yustiningrum et al., *Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoekonomi* (Penerbit Andi, 2024).

- JURNAL EKONOMI PERJUANGAN* 6, no. 1 (2024)
- Bakry, Kasman, Jana Milia, Rengga Yudha Santoso, Saiful Asra, Muhammad Akbar Hajuan, Mohammad Maiwan, Sumardi Sumardi, Lensi Megah Retta, Mursyidin Mursyidin, and Erman Rahim. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bustum, Thomas, Nurul Aliah, Maya Kasmita, Universitas Pasundan, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Makassar, Pelayanan Publik, and Penelitian Kualitatif. “Kepemimpinan Transformasional Sebagai Basis Pelayanan Publik Di Indonesia Transformational Leadership as the Basis of Public” 6, no. 1 (2024).
- Gismar, Abdul Malik, Lenny Hidayat, Inda Loekman, Dadan S Suharmawijaya, Nicolaus Harjanto, Hery Sulistio, Ahmad Fawaiq, Arif Nurdiansah, Amalia Fubani Sitanggang, and Fitrya Ardziyani Nuril. *Menata Indonesia Dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.
- Gunawan, Budi, and Barito Mulyo Ratmono. *Demokrasi Di Era Post Truth* (2021). Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Imamia, Anisa, Atin Ismatus Zehro, Egi Imanullah Sjarif, Tholiatur Rizkiyah, Rofiyatul Jennah, and Zulfia Rusdani. *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.
- Iqrom, Pahrizal. *Reformasi Birokrasi Di Nusantara*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Jurnal, Aktivisme, Ilmu Pendidikan, Sosial Indonesia, Deby Alista, and Putri Nurhayani. “Kepemimpinan Transformasional Dalam Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Sektor Publik : Kajian Literatur Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dapat Menjadi Pendekatan Efektif Dalam” 2, no. September (2025).
- Katharina, Riris. *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Nashir, Asep Kamaluddin. “Kepentingan Dan Posisi Strategis Indonesia Dalam Peta Geopolitik Indo-Pasifik.” *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 2 (2024)
- Press, U G M. *G20 Di Tengah Perubahan Besar: Momentum Kepemimpinan Global Indonesia?* UGM PRESS, 2023.
- Publik, Birokrasi, Pemerintah Provinsi, and Sumatera Selatan. “1,2,3,34” 7 (2024)
- Rachmad, Yoesoep Edhie, Rozali Ilham, Novi Indrayani, Halomoan Edy Manurung, Loso Judjianto, Rudy Dwi Laksono, and Sa’dianoor Sa’dianoor. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Savitri, Astrid. *Bonus Demografi 2030: Menjawab Tantangan Serta Peluang Edukasi 4.0 Dan Revolusi Bisnis 4.0*. Penerbit Genesis, 2019.
- Triadi, Irwan, Ilham Firmansyah, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, and Rachel Lubis. “Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai Dalam Pemerintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 3 (2024)
- Widjaja, Gunawan, and Handojo Dhanudibroto. “Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan.” *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025)
- Yuniar, Ririt. *Kepemimpinan Pancasila Di Era Transformasi Digital*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.
- Yustiningrum, R R Emilia, Mario Surya Ramadhan, Dewi Fortuna Anwar, Ganewati Wuryandari, Athiqah Nur Alami, R A Rizka Fiani Prabuningtyas, and Adriana Elisabeth. *Indo-Pasifik Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Dimensi Geopolitik, Geostrategi, & Geoekonomi*. Penerbit Andi, 2024.

